PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 226119, 235105
Laman : www.disdikpora.baliprov.go.id, Pos-el : disdikpora@baliprov.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI 2024

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Softcopy		
1.	Kedudukan/ domisili	Berisi tentang kedudukan, domisili alamat lengkap Disdikpora Provinsi Bali	Sekretariat	Sekretariat	2024	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/kontak-kami/
2.	Stuktur Organisasi	Memuat struktur organisasi Disdikpora Provinsi Bali	Sekretariat	Kasubbag Umum Kepegawaian	2024	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/struktur-organisasi/
3.	Visi dan Misi	Memuat visi dan misi	Sekretariat	Kepala Dinas	2024	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/visi-dan-misi/

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

		Disdikpora Provinsi Bali							
4.	Tugas Pokok dan Fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Disdikpora Provinsi Bali	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/tugas-dan-fungsi/
5.	Daftar Dinas Pendidikan Kab/Kota di wilayah Provinsi Bali	Memuat daftar Dinas Pendidikan Kab/Kota di wilayah Daftar Provinsi Bali	Sekretaris	Kasubbag Umum Kepegawaian	2024	✓	✓	Akitf	https://disdikpora.baliprov.go.id/informasi-dinas-pendidikan-kabupaten-kota/
6.	SOP	Berisikan SOP Bidang/UPTD/ Sekretariat	Sekretaris	Kasubbag Umum Kepegawaian	2024	✓	✓	Akitf	https://disdikpora.baliprov.go.id/standar-pelayanan/
7.	PPDB	Berisikan informasi tentang PPDB	Sekretaris	Kepala Dinas	2024	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/ppdb-tahun-pelajaran-2024-2025/
8.	Laporan Keuangan Tahun Terakhir	Berisikan Laporan Keuangan OPD	Sekretaris	Sekretaris (Tim Kerja Keuangan)	2023	✓	✓	Akitf	https://drive.google.com/drive/folders/13JtyqNRdU33e6tzvi_GPSQsDpx_WACci

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

DAFTAR INFORMASI KECUALIKAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI 2024

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Nota Dinas	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3.	Data Pribadi Pegawai	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat- surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	- Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Dapat mengungkap data rahasia Pegawai	Melindungi kerahasiaan data pribadi Pegawai

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

4.	MoU/SPK yang masih dalam proses	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkanke pada public - Selama proses pengadaan barang/jasa	Mempengaruhi obyektivitas penilaian pengadaan barang jasa	Melindungi obyektivitas penilan pengadaan barang jasa
5.	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan)	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama proses pengadaan barang jasa	Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi obyektivitas penilaian pengadaan barang jasa
6.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI sehingga persaingan usaha jadi tidak sehat - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar	Melindungi obyektiv penilaian pengadaan barang jasa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

		- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Selama proses pengadaan barang/jasa		
7.	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai(SKP)	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan) - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	- Menghambat pengambilan kebijakan - Dapat mengungkap data rahasia Pegawai	Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan Melindungi kerahasiaan data pribadi pegawai

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

8.	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan) - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	- Menghambat pengambilankebijakan - Dapat mengungkap Data rahasia Pegawai	- Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan - Melindungi kerahasiaan data pribadi Pegawai
9.	Sambutan Khusus yang belum dibacakan	Hanya dapat dipublikasikan setelah acara berlangsung	1 Hari/ 24 Jam	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan
10.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

11.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia,terbatas,berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait dan Aturan pelaksanaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
12.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen

Bali, 5 Juni 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS

Dr. KN. Boy Jayawibawa

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19651130 199203 1 010

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BANGGA BUATAN INDONESIA

BANGGA BERWISATA DI INDONESIA